



# RENSTRA DINAS KESEHATAN

2024 - 2026

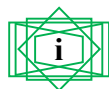


# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>11</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Parepare.....	20
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare.....	23
2.4. Kelompok Sasaran Layanan .....	59
<b>BAB III      PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT                   DAERAH</b> .....	<b>60</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	60
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD.....	61
3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	64

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>66</b>
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Parepare .....	66
	4.2 <i>Cascading</i> Kinerja.....	68
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....</b>	<b>72</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>74</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>92</b>
	7.1 Indikator Kinerja Utama.....	92
	7.2 Indikator Kinerja Kunci.....	94
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
	8.1 Pedoman Transisii.....	103
	8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	103

**No Dokumen : 000/01/Renstra 2024-2026**  
**Tanggal Dokumen : 12 Mei 2023**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya Jualah Penyusunan Renstra 2024-2026 Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun dapat diselesaikan.

Renstra 2024-2026, merupakan gambaran *blue print* Dinas Kesehatan Kota Parepare dan juga sebagai pedoman perencanaan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Parepare

Diharapkan Renstra 2024-2026 ini dapat dijadikan acuan seluruh staf Dinas Kesehatan Parepare dalam pencapaian target RPD Kota Parepare 2024-2026. dan juga dapat Renstra 2024-2026 dapat menjadi referensi yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kota Parepare sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam Renstra 2024-2026 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Untuk itu kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan guna penyempurnaan Renstra 2024-2026 di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga Penyusunan Renstra 2024-2026 ini dapat diselesaikan tepat waktu. Semoga Penyusunan Renstra 2024-2026 ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan kesehatan khususnya di Dinas Kesehatan Kota Parepare

Parepare, Mei 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Parepare,

**Rahmawaty, SKM, M.Kes (MARS)**

Pembina Tingkat I

NIP. 19750121 200212 2 004



Lampiran Peraturan Walikota  
Parepare Nomor ... Tahun 2023  
Tentang Rencana Strategis Dinas  
Kesehatan Kota Parepare Tahun  
2024 -2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan tersebut diselenggarakan dengan berazaskan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus kepada penduduk rentan antara lain: ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut dan keluarga miskin . Hal ini seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan:

- 1) Upaya Kesehatan
- 2) Pembinaan Kesehatan
- 3) Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 4) Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makanan
- 5) Manajemen dan informasi kesehatan
- 6) Pemberdayaan Masyarakat

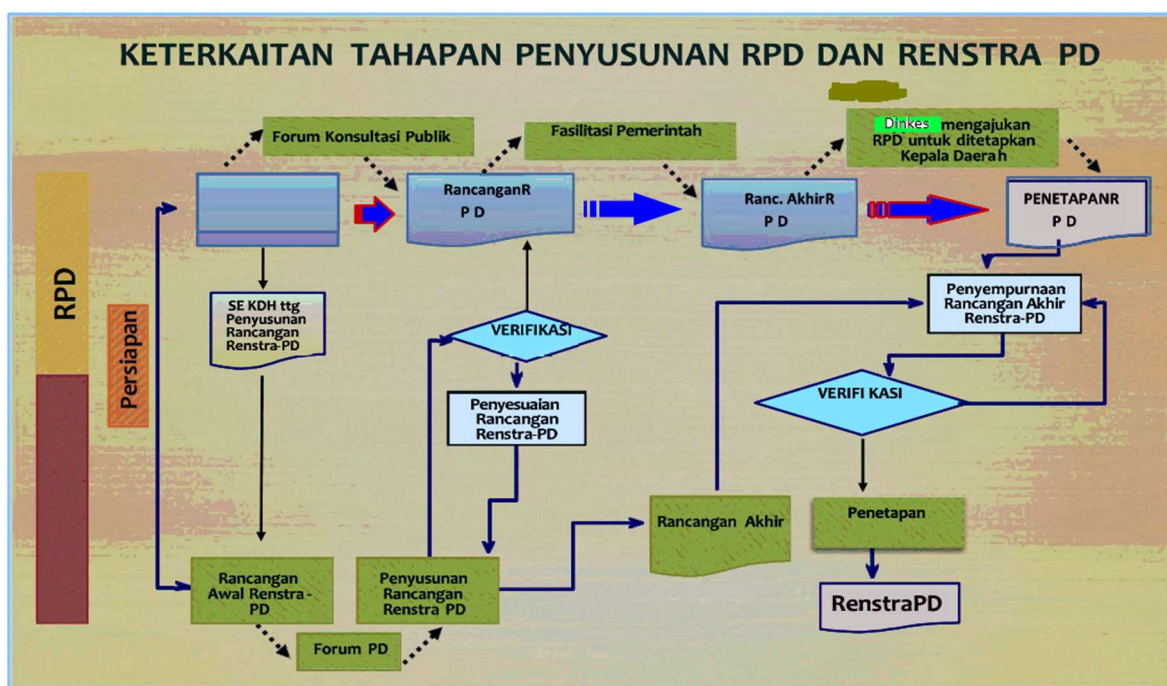
Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Oleh karena itu maka pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan yang diwujudkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare adalah dokumen penyesuaian Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk periode 3 (tiga) tahun kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dan disusun sesuai tugas dan fungsi serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare beserta jaringannya maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk tahun 2024-2026.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) antara Tahapan RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1.1  
Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah



Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa tiga tahun tersebut Dinas Kesehatan Kota Parepare berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini.

Selain itu Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare ini dapat digunakan sebagai :

1. acuan penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare;
2. dasar Penilaian kinerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare;
3. acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Parepare.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007



- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  17. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi

- Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bag Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru mengamanahkan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
  28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
  29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009);
  30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 5);
  31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

32. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2020, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 143);
33. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Parepare Tahun 2021-2041;
34. Peraturan Walikota No. 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
35. Peraturan Wali Kota Parepare Parepare Nomor .... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2023 Nomor....., Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor ...).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2024-2026 dan menjamin terciptanya harmonisasi, sinergitas dan konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah di bidang kesehatan. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Bappeda Kota Parepare Tahun 2024-2026, adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare selama periode Tahun 2024-2026;
- b. menetapkan indikator kinerja perangkat daerah yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026 sesuai tugas dan fungsinya.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Mengacu pada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen RPD dan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat informasi tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas tentang sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan kinerja pelayanan perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya, dan kelompok sasaran layanan perangkat daerah.

### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi perangkat daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan eselon III.

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah  
Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Menguraikan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan perangkat daerah, indikator kinerja TPB, dan indikator kinerja lainnya.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan  
Menguraikan kelompok sasaran layanan perangkat daerah yang merupakan penerima manfaat dari hasil kinerja organisasi perangkat daerah

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah, meliputi :

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah  
Sub Bab ini menguraikan permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD  
Sub bab ini mengemukakan tugas dan fungsi perangkat daerah yang terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis  
Sub bab ini mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau. Sehingga pada sub bab ini akan menyajikan informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang didasarkan pada RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026, meliputi :

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah  
Sub Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilengkapi dengan indikator dan target kinerja tahun 2024-2026.
- 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah  
Sub bab ini mengemukakan cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Menguraikan tentang rumusan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerjanya, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menguraikan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, meliputi :

- 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Sub Bab ini menguraikan tentang penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)  
Sub Bab ini menguraikan tentang penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

## **BAB VIII PENUTUP**

Menguraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Gambaran pelayanan kesehatan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Parepare merupakan gambaran hasil penyelenggaraan upaya kesehatan yang tidak terlepas dari amanat Pembukaan UUD 1945 yang bertujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Oleh karena itu untuk dapat menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare dari tahun 2024-2026 yang menjadi dasar dalam perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat ditinjau dari keberhasilan penyelenggaraan upaya kesehatan sebagai suatu sistem.

#### **2.1 . Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare, Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesehatan;
- b. pemberian dukungan, pengaturan dan koordinasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kesehatan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **1. KEPALA DINAS KESEHATAN**

- (1) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi pelaksana urusan pemerintahan Bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.



- (2) Kepala Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  
- (3) Rincian Tugas Kepala Dinas Kesehatan sebagai berikut:
  - a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Kesehatan;
  - b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja bidang Kesehatan;
  - c. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan di bidang Kesehatan;
  - d. Melaksanakan dan menyelenggarakan bidang Kesehatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  - e. Memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan lingkup Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai pembina karier;
  - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesehatan;
  - g. Melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
  - h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;

## 2. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan penatausahaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan meliputi administrasi umum,

kepegawaian, penyusunan dan perencanaan program dan kegiatan serta keuangan, dan evaluasi dan pelaporan.

(2) Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan dan serta evaluasi dan pelaporan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian pelaksanaan urusan kepegawaian dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Merencanakan, menyusun, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan umum administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas kesehatan;
- c. Mengelola dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi umum perkantoran, kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- d. Memberikan arahan, membina dan menilai kinerja kepala sub bagian dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sebagai pembinaan dan pengembangan karier;
- e. Merumuskan dan menyusun rencana program dan kegiatan serta kebutuhan lingkup Dinas Kesehatan;

- f. Memantau dan melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi umum perkantoran, perencanaan dan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - g. Menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
  - h. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP );dan
  - i. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
  - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan;
3. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan upaya-upaya peningkatan status kesehatan keluarga, pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, mengadakan supervisi dan bimbingan teknis dalam bidang pencegahan dan pengendalian penyakit serta kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
  - (2) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
    - a. pembinaan dan pelaksanaan kesehatan masyarakat, pencegahan penyakit dan pengendalian penyakit;
    - b. penyebarluasan informasi di bidang kesehatan dan penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, kesehatan kerja, kesehatan olahraga dan imunisasi;
    - c. penyusunan program peningkatan gizi masyarakat; dan
    - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Rincian Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan program kerja;
  - b. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan institusi, kegiatan bina peran serta masyarakat dalam rangka mempercepat tumbuhnya gerakan-gerakan hidup sehat di masyarakat;
  - c. melaksanakan kegiatan administrasi umum perkantoran, membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
  - d. melaksanakan pembinaan kesehatan ibu, anak dan keluarga;
  - e. melaksanakan pembinaan gizi masyarakat;
  - f. mencari, menghimpun dan menyebarluaskan informasi serta pengembangan promosi kesehatan masyarakat;
  - g. melaksanakan Pengambilan tindakan bila ada Kejadian Luar Biasa (KLB) dan wabah;
  - h. melaksanakan pengolahan dan Penyebarluasan data penyakit menular sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk mengambil tindakan;
  - i. melaksanakan pengadaan penyelidikan dan penelitian di lapangan bila ada suatu kejadian luar bias, dan Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi suatu program pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - j. melaksanakan pengamatan penyakit terhadap keadaan perpindahan penduduk melalui upaya kesehatan transmigrasi, upaya Kesehatan Haji, upaya Kesehatan pariwisata serta Upaya Penanggulangan dan Pencegahannya dan pengamatan penyakit menular melalui pencatatan pelaporan dari puskesmas;
  - k. merencanakan dan pembuatan target sasaran imunisasi;
  - l. melaksanakan pendistribusian Vaksin ke Puskesmas dan Puskesmas Pembantu Dan Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;

- m. menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengembangan teknis imunisasi;
- n. menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa, wabah penyakit serta penanganan masalah kesehatan pasca bencana;
- o. menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga, kesehatan kerja dan olahraga dan pengawasan tempat-tempat umum;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan data/bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai bidang tugasnya;
- r. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 4. BIDANG PELAYANAN, PROMOSI DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

- (1) Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengawasan untuk peningkatan dan pengembangan rumah sakit Pemerintah Daerah dan swasta, Puskesmas, merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan pengawasan dan pengembangan usaha pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, pengaturan dan pemberian izin Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, pengobatan tradisional, usaha farmasi dan alat kesehatan.
- (2) Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan program bidang medik dasar, peningkatan di bidang sarana dan prasarana kesehatan bidang farmasi, perbekalan kesehatan dan makanan;

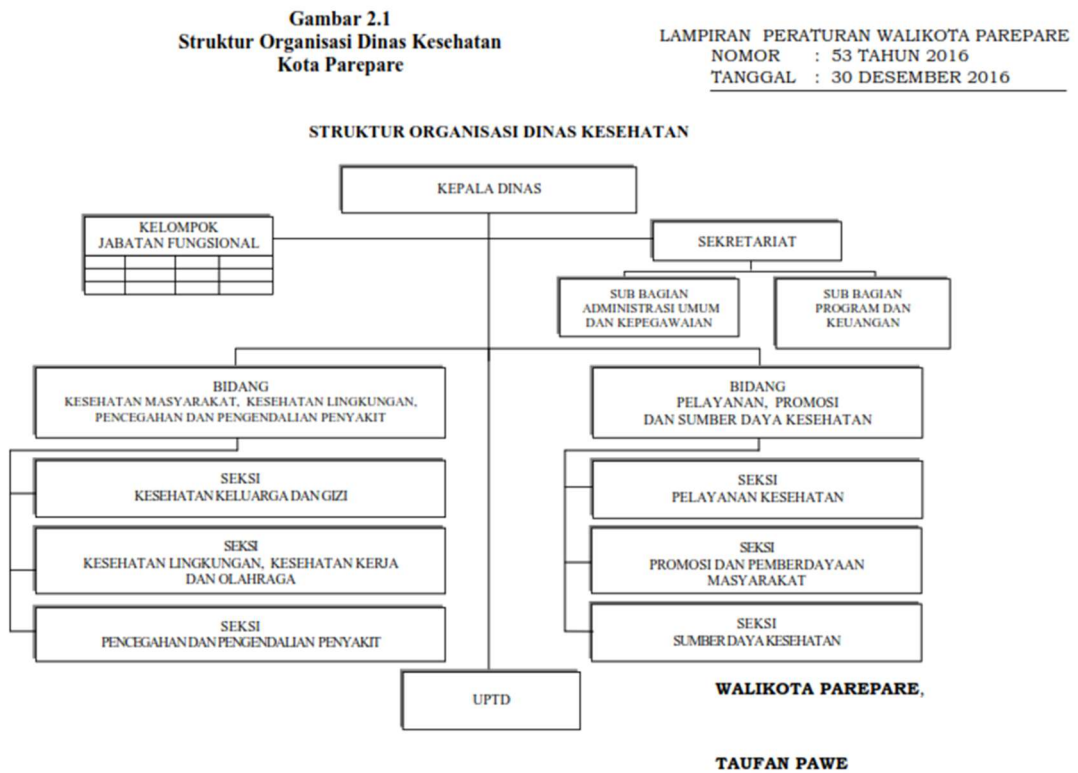
- b. Pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat, rumah sakit pemerintah daerah dan swasta;
  - c. Pengawasan distribusi NAPZA dan bahan berbahaya lainnya;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan bidang; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan sebagai berikut:
- a. menyusun rencana dan program kerja;
  - b. melaksanakan pembinaan usaha pengembangan rumah sakit, poliklinik, puskesmas, peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. melaksanakan analisa dan penilaian terhadap ketersediaan sarana pelayanan dasar, penggunaan alat perlengkapan rumah sakit, puskesmas serta alat-alat medik dan pelayanan kefarmasian;
  - d. menyusun bahan perumusan kebijaksanaan teknis mutu pelayanan kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan usaha kesehatan gizi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat dan kefarmasian;
  - e. menyusun bahan penyusunan rencana dan program pembangunan kesehatan, pengaturan dan pengoperasian sistem kesehatan;
  - f. menyusun bahan bimbingan dan pengendalian teknis pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan usaha kesehatan gizi, mata, laboratorium serta upaya peningkatan mutu Pelayanan kesehatan masyarakat;
  - g. mengkoordinasikan ketersediaan, jaminan mutu, pemerataan dan keterjangkauan obat dan perbekalan/alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, kesehatan dasar (puskesmas dan *buffer stock*);
  - h. menyelenggarakan perumusan bahan untuk penyusunan pelayanan bidang medik dasar (puskesmas dan rumah sakit, specialist, gigi, rujukan, keperawatan), kebutuhan obat dan perbekalan/alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar;
  - i. melaksanakan pengendalian pengelolaan obat dan berbekalan/alat kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penggunaan,

- pendistribusian serta pencatatan dan pelaporannya untuk pelayanan kesehatan;
- j. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengaturan, dan perizinan sarana Pelayanan, Promosi dan Sumber Daya Kesehatan, sarana distribusi sediaan farmasi, serta sarana distribusi perbekalan/alat kesehatan;;
  - k. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengawasan, pembinaan, pengaturan dan pemberian izin kerja/praktek tenaga kesehatan (dokter/dokter gigi/apoteker/asisten apoteker/bidan/dll), termasuk pengobatan tradisional (battra);
  - l. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka penggerakan Penggunaan Obat Rasional (POR);
  - m. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) dan mekanisme pelaporannya;
  - n. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengawasan dan pengamanan distribusi NAPZA dan bahan berbahaya, sediaan farmasi (obat, bahan obat, kosmetika dan obat asli Indonesia/obat Tradisional), perbekalan/alat kesehatan, serta makanan/minuman;
  - o. menyusun/menyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengawasan kegiatan pengobatan tradisional (batantra);
  - p. menyusun/meyiapkan bahan, pedoman dan petunjuk teknis dalam rangka pengembangan obat asli Indonesia;
  - q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - r. menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta penyiapan data/bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah sesuai bidang tugas;
  - s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
  - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

### 2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 maka bagan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini :

Gambar 2.1.  
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Parepare





## **2.2 . Sumber Daya Dinas Kesehatan Kota Parepare**

Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti sumber daya tenaga, keuangan, sarana dan prasarana serta obat dan perbekalan kesehatan. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya tersebut sebagai input dalam melaksanakan tugasnya.

### **2.2.1. Sumber Daya Manusia Aparatur**

Jumlah Sumber Daya Manusia PNS/ASN dalam hal di Dinas Kesehatan Kota Parepare sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 446 orang yang tersebar di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Call Centre 112. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi aparatur Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Aparatur berdasarkan pendidikan, pangkat, dan Jabatan**  
**Per 31 Desember Tahun 2022.**

Pendidikan				Pangkat				Jabatan			
Jenjang	Jumlah (Org)		Total	Jenjang	Jumlah (Org)		Total	Jenjang	Jumlah (Org)		Total
	L	P			L	P			L	P	
S2	14	27	41	Pembina Utama Madya	0	1	1	Eselon lib	0	1	1
S1	47	208	256	Pembina Utama Muda	0	17	17	Eselon IIIa	2	0	2
D4	6	23	29	Pembina Tk. I	3	28	31	Eselon IIIb	5	2	7
D3	12	92	104	Pembina	28	80	108	Eselon IVa	8	5	13
SMA / Sederajat	6	10	16	Penata Tk. I	18	74	92	Tubel	3	5	8
<b>JUMLAH</b>	<b>85</b>	<b>361</b>	<b>446</b>	Penata	16	78	94	Fungsional Khusus	54	307	361
				Penata Muda Tk.I	9	46	55	Fungsional Umum	13	41	54
				Penata Muda	8	17	25	<b>JUMLAH</b>	<b>85</b>	<b>361</b>	<b>446</b>
				Pengatur Tk.I	3	11	14				
				Pengatur	0	9	9				
				<b>JUMLAH</b>	<b>85</b>	<b>361</b>	<b>446</b>				

Aparatur Dinas Kesehatan Kota Parepare pada tahun 2022 berjumlah 446 orang, yang terdiri dari 395 orang PNS, dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 41 orang, Strata 1 (S1) sebanyak 256 orang, Diploma 4 (D4) berjumlah 29 orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 104 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 16 Orang.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, Dinas Kesehatan Kota Parepare dilengkapi dengan fasilitas berupa tanah, gedung serta peralatan lainnya dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 2.2**  
**Jenis dan Nilai peralatan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2022**

NO	JENIS FASILITAS	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	TANAH	12.860.556.783,29	Lokasi : Dinas Kesehatan Kota Parepare, Instalasi Farmasi dan Puskesmas, Call Centre 112, Labkesda
2	PERALATAN DAN MESIN	157.870.457.268,41	
	a. Alat-Alat Besar	1.925.137.900,01	
	b. Alat Angkutan	10.693.973.179,48	
	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	84.112.793	
	d. Alat Pertanian	41.850.000	
	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.614.399.536,81	
	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	391.554.132,00	
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	106.033.645.445,19	
	h. Alat Laboratorium	11.653.464.787,25	
	i. Komputer	5.342.719.494,67	
	j. Peralatan Proses/Produksi	89.600.000	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	193.651.026.713,76	
	a. Bangunan Gedung	193.173.877.713,76	
	b. Tugu Titik Kontrol/Pasti	477.149.000	
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	6.484.053.065,77	
	a. Jalan dan Jembatan	288.000.000	
	b. Bangunan Air	1.308.106.410,73	
	c. Instalasi	3.264.406.655	
5	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaa	114.633.400,00	
6	ASET LAINNYA	7.565.736.471,05	

Sampai dengan tahun 2022 di Kota Parepare terdapat sarana kesehatan antara lain : 5 unit Rumah Sakit, 8 Unit Puskesmas, 22 Unit Pustu, dan 17 unit Poliklinik

Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berbagai upaya dilakukan

dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada termasuk yang ada dimasyarakat. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) diantaranya adalah Posyandu, Poskeskel, Kelurahan Siaga, Posbindu, Pos UKK (Pos Upaya Kesehatan Kerja) dan lain-lain.

Posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM yang paling dikenal dimasyarakat. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Adapun jumlah Posyandu yang ada di Kota Parepare pada tahun 2022 adalah 130 unit. Jika dibandingkan dengan jumlah kelurahan yakni 22 kelurahan, maka rasio Posyandu terhadap kelurahan adalah 5,9 hampir disetiap kelurahan memiliki 5 atau 6 unit Posyandu.

### **2.3 . Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare**

Secara umum kinerja Dinas Kesehatan Kota Parepare berkaitan dengan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, sarana dan prasarana dan sumber daya kesehatan

Kinerja Dinas Kesehatan secara khusus dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator. Adapun tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2019 - 2023

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran baru				3,04	2,66	2,28	1,52	0,76	1,1	2,11	7,23	9,77	0,76	66,9	23,4	-214,4	-540,1	0,9	
2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi				995	995	994,00	996,00	998	999	995	981,00	977,00	977,00	100,4	100,0	98,7	98,1	97,9	
3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup				6,00	5,00	4,00	2,00	2	0	0	0	0,00	0,00	106,0	105,0	104,0	102,0	102,0	
4	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup				3,04	2,66	2,28	3,04	2	6,61	1,69	5,33	8,49	8,49	-114,1	39,2	-131,1	-175,9	-456,4	
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup				84,93	84,93	84,93	84,93	85	146,79	73,39	228,31	212,31	212,31	12,1	98,5	-83,9	-65,1	-65,1	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
6	Rasio Posyandu per satuan balita				8,92	8,92	8,92	8,93	9	9,06	8,46	10,00	13,86	13,86	101,6	94,8	112,1	155,2	153,0	
7	Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), puskesmas pemb. per 100.000 penduduk				0,25	0,29	0,26	0,29	0	0,25	0,29	0,26	0,29	0,30	100,0	100,0	100,0	100,0	103,4	
8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk				0,03	0,03	0,03	0,03	0	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
9	Rasio dokter persatuan penduduk				0,0050	0,0050	0,0050	0,0050	0	0,0009	0,0011	0,0016	0,0045	0,0053	18,0	22,0	31,4	90,0	106,0	
10	Rasio tenaga medis per 1.000 Penduduk				0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0	0,0067	0,0091	0,0099	0,0098	0,0098	68,4	92,9	101,1	100,0	100,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2023	2019	2020	2021	2022
11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani				100	100	100,00	100,00	100	100	100	34,25	100,00	100,00	100,0	100,0	34,2	100,0	100,0
12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan				87,00	87,00	87,00	87,00	87	94,51	76,6	86,50	87,00	87,00	108,6	88,0	99,4	100,0	100,0
13	Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)				100	90,91	100,00	100,00	100	100	90,91	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan				100	100	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
15	Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum				60,00	60,00	60,00	60,00	60	72,85	70,9	70,70	60,00	60,00	121,4	118,2	117,8	100,0	100,0	
16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak				100,00	100,00	100,00	100,00	100	110,69	128,48	101,30	100,00	100,00	110,7	128,5	101,3	100,0	100,0	
17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk				0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani				100	100	100	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA				80,00	80,00	80,00	80,00	80	82,67	47,42	44,53	70,42	70,42	103,3	59,3	55,7	88,0	88,0	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis				95,00	95,00	95,00	95,00	95	309,96	194,77	183,46	290,09	290,09	-131,3	-10,0	1,9	-110,4	-110,4	
21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis				1,83	1,60	1,37	1,14	1	12,39	9,9	6,44	3,65	3,65	-576,5	-517,9	-368,8	-218,9	-218,9	
22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS				80,00	80,00	80,00	80,00	80	82,67	47,42	44,53	87,00	87,00	103,3	59,3	55,7	108,8	108,8	
23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS				90,00	90,00	90,00	95,00	95	87,63	28,47	90,17	87,00	87,00	97,4	31,6	100,2	91,6	91,6	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	2023
24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD				100	100	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
25	Penderita diare yang ditangani				31,64	100	100,00	100,00	100	31,64	100	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
26	Angka kejadian akibat malaria				25,00	24,00	23,00	20,00	20	9,44	13,2	11	10,00	10,00	87,2	69,0	75,2	70,0	70,0
27	Angka kematian akibat malaria				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat				0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
30	Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi				0,05	0,05	0,05	0,05	0	0,29	0,2244	0,20	0,35	0,35	-480,0	-348,8	-309,3	-600,0	-600,0
31	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir				75,00	75,00	80,00	80,00	90	74,99	74,55	74,70	75,00	75,00	100,0	99,4	93,4	93,8	83,3

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS				75,00	80,00	80,00	85,00	90	34,90	39,53	42	50,00	50,00	46,5	49,4	52,5	58,8	55,6	
33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin				100,00	100,00	100	100,00	100	28	18	100	100,00	100,00	28,0	18,0	100,0	100,0	100,0	
34	Cakupan kunjungan bayi				100	100	100	100	100	100	99,11	100,00	90,00	90,00	100,0	99,1	100,0	90,0	90,0	
35	Cakupan Puskesmas				150,00	200,00	200,00	200,00	200	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
36	Cakupan pembantu puskesmas				136,36	136,36	95,45	95,45	95	136,36	136,36	95,45	95,45	95,45	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4				86,63	68,15	76,76	65,80	66	86,63	68,15	76,76	65,80	65,80	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
38	Cakupan pelayanan nifas				94,51	94,51	94,51	94,51	94,51	94,51	75,44	82,73	69,70	69,70	100,0	79,8	87,5	73,7	73,7	
39	Cakupann neonatus dengan komplikasi yang ditangani				90,00	90,00	90,00	90,00	90	56,2	56,28	100,00	90,00	90,00	62,4	62,5	111,1	100,0	100,0	
40	Cakupan pelayanan anak balita				100,00	100,00	100,00	100,00	100	99,05	59,63	75,74	100,00	100,00	99,1	59,6	75,7	100,0	100,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin				100	100	100,00	100,00	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
42	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat				100,00	100,00	100,00	100,00	100	99,97	25,5	26,2	100,00	100,00	100,0	25,5	26,2	100,0	100,0	
43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin				100	100	100	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
44	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)				100	100	100	100,00	100	100	100	100	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam				100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	<b>Indikator SPM</b>																			
46	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	84,77	68,16	100,00	100,00	100,00	84,8	68,2	100,0	100,0	100,0	
47	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	89,78	76,60	100,00	100,00	100,00	89,8	76,6	100,0	100,0	100,0	
48	Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	92,81	81,28	100,00	100,00	100,00	92,8	81,3	100,0	100,0	100,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
49	Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	37,76	59,64	100,00	100,00	100,00	37,8	59,6	100,0	100,0	100,0	
50	Persentase Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	12,74	4,85	97,94	100,00	100,00	12,7	4,9	97,9	100,0	100,0	
51	Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	10,20	4,13	4,13	24,32	24,32	10,2	4,1	4,1	24,3	24,3	
52	Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	83,00	98,29	82,28	100,00	100,00	83,0	98,3	82,3	100,0	100,0	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2023	2019	2020	2021	2022
53	Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	12,55	17,42	100,00	100,00	100,00	12,6	17,4	100,0	100,0	100,0
54	Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan Layanan kesehatan				100	100	100	100	100	60,12	113,40	100,00	100,00	100,00	60,1	113,4	100,0	100,0	100,0
55	Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan				100	100	100	100	100	100,00	98,53	100,00	100,00	100,00	100,0	98,5	100,0	100,0	100,0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
56	Persentase Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	103,20	100,00	100,00	100,00	100,00	103,2	100,0	100,0	100,0	100,0
57	Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan				100	100	100	100	100	7,64	85,55	100,00	100,00	100,00	7,6	85,6	100,0	100,0	100,0
58	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.				90	90	90	90	90	80,00	84,00	84,00	85,00	90,00	88,9	93,3	93,3	94,4	100,0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
59	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.				100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
60	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.				80	80	80	80	80	60,00	70,00	75,00	77,00	77,00	75,0	87,5	93,8	96,3	96,3
61	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.				12	12	12	12	12	13,00	12,00	12,21	13,70	13,70	3,7	12,0	10,3	-2,2	-2,2

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
62	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita				12	12	12	12	12	13,00	14,00	14,72	13,70	13,70	3,7	-4,7	-10,7	-2,2	-2,2	
63	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta				12	12	12	12	12	18,00	19,00	19,84	13,90	13,90	-38,0	-46,3	-53,3	-3,8	-3,8	
64	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.				5	5	5	5	5	3,00	3,50	4,72	5,00	5,00	45,0	35,0	10,6	5,0	5,0	
65	Prevalensi anemia pada ibu hamil.				8	8	8	8	8	8,00	8,00	8,60	9,00	9,00	8,0	8,0	0,5	-4,5	-4,5	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
66	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif				60	60	60	60	60	50,00	55,00	54,44	60,00	60,00	83,3	91,7	90,7	100,0	100,0	
67	Angka Kematian Ibu (AKI).				84,93	84,93	84,93	84,93	85	146,79	73,39	228,31	212,31	212,31	12,1	98,5	-83,9	-65,1	-65,1	
68	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih				85	85	85	85	85	94,51	76,6	86,50	87,00	87,00	111,2	90,1	101,8	102,4	102,4	
69	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan				85	85	85	85	85	94,51	76,6	86,50	87,00	87,00	111,2	90,1	101,8	102,4	102,4	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
70	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
71	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.				3,04	2,66	2,28	3,04	2	6,61	1,69	5,33	8,49	8,49	-114,1	39,2	-131,1	-175,9	-456,4	
72	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup				3,04	2,66	2,28	1,52	1	1,1	2,11	7,23	9,77	0,76	66,9	23,4	-214,4	-540,1	0,9	
73	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.				0,01	0,01	0,01	0,01	0	0,29	0,2244	0,20	0,35	0,35	-2800,0	-2144,0	-1946,8	-3400,0	-3400,0	
74	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.				0,05	0,05	0,05	0,05	0	0,29	0,2244	0,20	0,35	0,35	-480,0	-348,8	-309,3	-600,0	-600,0	
75	Kejadian TB per 1000 orang				2	2	2	2	2	3,00	2,00	1,83	9,00	9,00	-48,0	2,0	10,3	-348,0	-348,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
76	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk				100	100	100	100	100	450,00	420,00	416,59	290,00	290,00	-250,0	-220,0	-216,6	-90,0	-90,0	
77	Persentase kecamatan yang mencapai 80Persen imunisasi dasar lengkap bayi				100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
78	Kejadian Malaria per 1000 orang.				0,07	0,07	0,07	0,07	0	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	100,0	100,0	103,8	100,0	100,0	
79	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.				14	14	14	14	14	17,00	16,00	15,85	14,00	14,00	-7,4	-0,3	0,8	14,0	14,0	
80	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).				4	4	4	3	3	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-46,0	-46,0	-46,0	-97,0	-97,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
81	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18tahun.				10	10	20	15	10	10,00	5,00	5,17	20,00	20,00	10,0	60,0	94,1	-18,3	-90,0	
82	Prevalensi tekanan darah tinggi.				10	10	16	15	10	10,00	10,00	17,00	20,00	10,00	10,0	10,0	9,8	-18,3	10,0	
83	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun				24	24	24	24	24	20,00	30,00	5,02	30,00	30,00	40,7	-1,0	103,1	-1,0	-1,0	
84	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa				6	7	8	8	8	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
85	Prevalensi penyalahgunaan narkoba				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	



No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun					Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023
86	Konsumsi alcohol (liter per kapita) oleh penduduk umur > 15 tahun dalam satu tahun terakhir				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
87	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.				1	1	1	1	1	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	-399,0	-399,0	-399,0	-499,0	-499,0	
88	Unmet need pelayan kesehatan				n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
89	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk				800	800	800	800	800	800,00	820,00	844,00	850,00	850,00	100,0	102,5	105,5	106,3	106,3	
90	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).				85	85	85	85	85	80,00	84,00	84,40	85,00	85,00	94,1	98,8	99,3	100,0	100,0	

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022		2019	2020	2021	2022	2023
91	Persentase merokok pada penduduk umur $\geq 15$ tahun				10	10	20	15	10	10,00	5,00	5,17	20,00	20,00	10,0	60,0	94,1	-18,3	-90,0
92	Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan				100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
93	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.				100	100	100	100	100	100	100	100,00	99,00	100,00	100,0	100,0	100,0	99,0	100,0
94	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.				1,11	1,11	1,11	1,11	1	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian pada Tahun				Rencana	Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
95	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.				90	90	90	90	90	25	25	25,00	25,00	50,00	27,8	27,8	27,8	27,8	55,6
96	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).				22,00	22,00	22,00	22,00	22	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
97	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).				22,00	22,00	22,00	22,00	22	20,00	20,00	22,00	22,00	22,00	90,9	90,9	100,0	100,0	100,0

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian beberapa indikator kinerja telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu :

1. Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran hidup.  
Tidak adanya kasus angka kematian balita dan faktor yang mendukung keberhasilan adalah kegiatan pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, puskesmas dan sarana fasilitas layanan kesehatan lainnya
2. Rasio Posyandu Per satuan Balita.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan posyandu, dan eksistensinya kader posyandu di Kota Parepare untuk melayani pelayanan kesehatan balita
3. Rasio puskesmas, poliklinik (klinik), puskesmas pembantu. per 100.000 penduduk.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah adanya penambahan puskesmas baru dan munculnya poliklinik/klinik swasta
4. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah hadirnya Rumah Sakit dr Hasri Ainun Habibie dalam melakukan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kota Parepare
5. Rasio dokter persatuan penduduk.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah setiap tahun selalu ada penerimaan pegawai untuk formasi dokter
6. Rasio tenaga medis per 1.000 Penduduk.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah setiap tahun selalu ada penerimaan pegawai untuk formasi tenaga medis
7. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani dan cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kemampuan bidan dengan kompetensinya dapat melakukan penanganan terhadap kasus-kasus komplikasi
8. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah jumlah bidan yang sangat memadai di fasilitas pelayanan kesehatan
9. Cakupan kelurahan universal child immunization (UCI)  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan posyandu di setiap kelurahan dan aktifnya petugas Imunisasi puskesmas dalam melakukan pelayanan penyuntikan dan penyuluhan imunisasi
10. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

- Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan berjalannya kegiatan Surveilans Gizi yang dilaksanakan oleh petugas gizi
11. Jumlah proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan bahan makanan pokok yang mudah diakses dengan harga terjangkau sehingga tingkat konsumsi makanan berkalori tinggi meningkat
  12. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan posyandu di setiap kelurahan dan aktifnya petugas Imunisasi puskesmas dalam melakukan pelayanan penyuntikan dan penyuluhan imunisasi
  13. Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah tidak adanya faktor pencetus penyebab penyakit tersebut sehingga kasusnya jarang terjadi
  14. Cakupan balita pneumonia yang ditangani  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dasar khususnya di puskesmas telah ada poli anak yang berpisah dengan poli umum sehingga petugas kesehatan dapat langsung mengidentifikasi dan menangani kasus pneumonia pada balita.
  15. Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah semua fasilitas pelayanan kesehatan khususnya unit yang menangani TB telah melakukan program DOTS karena telah dilatih tentang program DOTS.
  16. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kemampuan petugas kesehatan dalam merespon cepat setiap ada laporan kasus DBD di wilayah kerja puskesmas masing-masing
  17. Penderita diare yang ditangani  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kemampuan petugas kesehatan dalam merespon cepat setiap ada laporan atau kasus kasus Diare di wilayah kerja puskesmas masing-masing
  18. Angka kematian akibat malaria

- Faktor yang mendukung keberhasilan adalah daerah Kota Parepare bukan merupakan daerah Endemis Penyakit Malaria.
19. Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah daerah Kota Parepare bukan merupakan daerah Endemis Penyakit Malaria.
  20. Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah daerah Kota Parepare bukan merupakan daerah Endemis Penyakit Malaria.
  21. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kepesertaan peserta BPJS khususnya peserta PBI yang memprioritaskan masyarakat miskin.
  22. Cakupan kunjungan bayi  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah tingginya kesadaran masyarakat memanfaatkan posyandu dan puskesmas serta sarana fasilitas pelayanan kesehatan lainnya khususnya pelayanan bayi dan anak
  23. Cakupan Puskesmas  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah adanya penambahan 2 (dua) puskesmas yakni Puskesmas Lauleng Bukit Harapan dan Puskesmas Lemoe
  24. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) dan berjalannya kegiatan Surveilans Gizi yang dilaksanakan oleh petugas gizi
  25. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah rutusnya petugas puskesmas melakukan pemeriksaan kesehatan di sekolah dasar dan setingkat dan aktifnya Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
  26. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kepesertaan peserta BPJS khususnya peserta PBI yang memprioritaskan masyarakat miskin.
  27. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan tenaga kesehatan dan sarana serta prasarana UGD yang

- memadai sehingga dapat melakukan pelayanan gawat darurat level 1
28. Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kesiapsiagaan puskesmas melalui tenaga surveilansnya dalam melakukan penyelidikan eipidemiologi sesegara mungkin jika ada KLB yang terjadi
  29. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya ibu hamil dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
  30. Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya ibu bersalin dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
  31. Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya ibu bersalin dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
  32. Persentase Balita yang mendapatkan layanan kesehatan  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya balita dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
  33. Persentase warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah di setiap fasilitas pelayanan kesehatan dasar khususnya di puskesmas telah ada poli lansia yang berpisah dengan poli umum dan telah adanya posyandu lansia dalam melakukan pelayanan kesehatan lanjut usia
  34. Persentase Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan Layanan kesehatan.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya penderita hipertensi dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
  35. Persentase Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan Layanan kesehatan

- Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya penderita diabetes mellitus dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
36. Persentase Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya penderita gangguan jiwa berat dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
37. Persentase Warga Negara terduga tuberculosi yang mendapatkan layanan kesehatan  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya orang terduga tuberculosi dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
38. Persentase Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan layanan di fasilitas kesehatan khususnya orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) dan ketersediaan SDM dan peralatan yang dibutuhkan
39. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah adanya dukungan anggaran dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Parepare dan DPRD terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan.
40. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah ketersediaan posyandu di setiap kelurahan dan aktifnya petugas Imunisasi puskesmas dalam melakukan pelayanan penyuntikan dan penyuluhan imunisasi
41. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah intensnya tenaga kesehatan dan kader posyandu dalam memberikan informasi tentang manfaat ASI bagi kesehatan bayi, dan hadirnya konselor menyusui di puskesmas yang memberikan motivasi kepada Ibu-Ibu agar menyusui bayinya khususnya pada periode kurang dari 6 bulan.



42. Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah jumlah bidan yang sangat memadai di fasilitas pelayanan kesehatan
43. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan kesehatan dan adanya layanan kesehatan Call Centre 112 yang segera datang ke rumah pasien untuk memberikan pelayanan kesehatan dan siap membawa pasien ke puskesmas atau rumah sakit jika diperlukan
44. Kejadian Malaria per 1000 orang.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah daerah Kota Parepare bukan merupakan daerah Endemis Penyakit Malaria.
45. Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah semua Puskesmas memiliki petugas kesehatan khusus menangani kesehatan jiwa
46. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah adanya dukungan anggaran dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Parepare dan DPRD terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan
47. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah adanya dukungan anggaran dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Parepare dan DPRD terhadap pembiayaan Jaminan Kesehatan
48. Proporsi populasi dengan akses ke obat-obatan dan vaksin yang terjangkau secara berkelanjutan  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah kemudahan mengakses sarana fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Parepare
49. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.  
Faktor yang mendukung keberhasilan adalah semua puskesmas telah menganggarkan kebutuhan obat esensial dan kebutuhan vaksin selalu mendapat *supply* dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
50. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

Faktor yang mendukung keberhasilan adalah jumlah tenaga kesehatan di puskesmas tersebar sesuai dengan kebutuhan puskesmas

51. Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Faktor yang mendukung keberhasilan adalah intensnya penyuluhan 5 (lima) pilar STBM di semua kelurahan.

52. Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Faktor yang mendukung keberhasilan adalah adanya peningkatan sosialisasi stop perilaku BABS dan tidak lanjut dalam bentuk pembangunan jamban untuk keluarga yang tidak mampu oleh stakeholder terkait

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu :

1. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran baru, Angka Kelangsungan Hidup Bayi, Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup, Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup.

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah dari faktor internal sang Ibu seperti adanya penyakit komplikasi lainnya, kurangnya kesadaran memeriksa secara rutin kehamilan di sarana pelayanan kesehatan, masih adanya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pertama di usia kehamilan lebih dari 12 minggu. kemudian dari faktor eksternal yakni tenaga kesehatan dan kader posyandu yang tidak intensif memantau ibu hamil yang beresiko tinggi di wilayah kerjanya dan belum ada puskesmas yang mampu poned

2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dan Tingkat Prevalensi Tuberkulosis

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan ketika sudah mengalami batuk lebih dari 2 (dua) minggu, kurang intensifnya tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan pencarian orang dengan terduga Tuberkulosis, kurangnya keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan penyakit tuberkulosis

3. Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah pemantauan pasien yang sedang mengalami pengobatan tidak dilakukan secara intensif khususnya dari pemantauan dari keluarga terdekat. Obat TB harus diminum secara rutin dan harus habis, ketika Obat TB tidak diminum sesuai aturan medis maka bakteri TB di dalam tubuh mengalami resistensi sehingga akan terjadi gagal pengobatan.

4. Tingkat kematian karena Tuberkulosis  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah karena penderita pasien TB adalah penderita penyakit yang rentan mendapatkan penyakit penyerta lainnya diakibatkan menurunnya daya tahan tubuh. Ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit sehingga peluang kematian cukup tinggi
5. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah teknologi seksualitas yang semakin canggih dengan tersedianya fitur teknologi komersil seks dan mudahnya akses hubungan seks komersil dan tumbuhnya beragam orientasi seksual
6. Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir.  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah terbatasnya stok kondom sedangkan pengguna kondom pada populasi seks berisiko tinggi semakin bertambah disertai juga kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan kondom dalam pencegahan penyakit menular seksual
7. Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah frekuensi pelaksanaan edukasi pada masyarakat berisiko yang masih kurang.
8. Cakupan pelayanan nifas  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah berkurangnya kunjungan ibu nifas ke fasilitas pelayanan dan adanya perubahan jumlah kunjungan masa nifas dari 3 kali menjadi 4 kali kunjungan
9. Persentase Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah kurangnya jumlah tenaga kesehatan melakukan *screening* penyakit terhadap kelompok usia produktif

10. Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah masih banyaknya pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi karena diakibatkan oleh faktor agama, kesehatan, efek samping kontrasepsi, keluarga yang tidak mendukung, ketidakcocokan dengan alat kontrasepsi
11. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dan prevalensi stunting serta Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah pengetahuan Sang Ibu yang kurang memadai dan asupan nutrisi yang kurang baik bagi ibu dan balita
12. Prevalensi anemia pada ibu hamil  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah asupan zat besi yang tidak memadai, tingkat pendapatan yang kurang, pengetahuan yang kurang dan dukungan keluarga yang kurang.
13. Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah mudahnya penyakit ini menular melalui kontak dengan cairan tubuh pasien, seperti darah dan produk darah, air liur, cairan vagina, cairan sperma, dan cairan tubuh lainnya.
14. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah penyakit kusta biasanya lambat disadari bahwa seseorang sudah terkena penyakit kusta
15. Persentase merokok pada penduduk umur  $\leq 18$  tahun dan umur  $\geq 15$  tahun  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah masih banyaknya kelompok usia tersebut belum memahami bahaya merokok sehingga masih mencoba rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik
16. Prevalensi tekanan darah tinggi  
Faktor utama yang menjadi penghambat adalah karena penyakit ini sering tanpa keluhan, sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi.
17. Prevalensi obesitas pada penduduk umur  $\geq 18$  tahun

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah pola makan yang berlebihan yang tinggi lemak dan gula serta kurang serat dan aktifitas fisik yang kurang gerak

18. Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah faktor manusia yaitu yang terkait dengan kemampuan serta karakter pengemudi, lalu disebabkan faktor kendaraan (terkait dengan pemenuhan persyaratan teknik laik jalan), kemudian disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan.

19. Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Faktor utama yang menjadi penghambat adalah masih banyak Rumah Tangga yang belum melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun

Selanjutnya, dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi memegang peranan penting dalam menentukan sejauh mana target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dinas Kesehatan Kota Parepare sebagai perangkat kerja yang melaksanakan urusan kesehatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan anggaran yang cukup besar dalam melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan. Target dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.4, sedangkan Target dan realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2021 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5. Pemisahan tabel ini dilakukan untuk mengatasi kendala teknis, dimana Renja Tahun 2019 - 2020 masih mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 dan nomenklatur program dan kegiatannya masih berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renja 2021-2023 telah berpedoman pada Permendagri 90 Tahun 2019 dan telah selaras dengan Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023. Demikian pula struktur keuangan pada tahun 2019-2020 masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan struktur keuangan pada tahun 2021-2023 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare**  
**Tahun 2019 - 2020**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (dalam ribu rupiah)		Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (dalam ribu rupiah)		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)		Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	27.094.153	27.475.036	27.178.119	27.102.541	100,31	98,64	1,41	(0,28)
2	Belanja Langsung	140.648.395	70.004.345	121.429.477	55.774.833	86,34	79,67	(50,23)	(54,07)
	a Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.126.196	1.389.994	1.902.197	1.268.723	89,46	91,28	(34,63)	(33,30)
	b Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	369.000	310.442	235.840	147.761	63,91	47,60	(15,87)	(37,35)
	c Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000	20.000	6.800	20.000	68,00	100,00	100,00	194,12
	d Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	40.000	36.000	39.995	24.561	99,99	68,23	(10,00)	(38,59)
	e Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.086.887	3.425.151	3.759.958	2.882.148	92,00	84,15	(16,19)	(23,35)
	f Program Upaya Kesehatan Masyarakat	38.274.359	38.677.280	33.954.302	33.096.834	88,71	85,57	1,05	(2,53)
	g Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	936.000	890.000	911.259	870.682	97,36	97,83	(4,91)	(4,45)
	h Program Perbaikan Gizi Masyarakat	222.437	302.715	210.119	262.036	94,46	86,56	36,09	24,71
	i Program Pengembangan Lingkungan Sehat	40.000	230.000	8.550	106.317	21,38	46,22	475,00	1.143,47
	j Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	762.911	3.402.013	353.253	2.888.891	46,30	84,92	345,93	717,80
	k Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	7.940.605	2.035.593	6.459.654	1.419.922	81,35	69,75	(74,36)	(78,02)
	l Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	90.000	30.000	77.482	20.219	86,09	67,40	(66,67)	(73,90)
	m Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	0	47.535		43.970		92,50	-	
	n Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata jaringannya	85.750.000	19.207.622	73.510.068	12.722.769	85,73	66,24	(77,60)	(82,69)
	<b>Jumlah Total</b>	<b>167.742.548</b>	<b>97.479.381</b>	<b>148.607.596</b>	<b>82.877.374</b>	<b>88,59</b>	<b>85,02</b>	<b>(41,89)</b>	<b>(44,23)</b>

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare**  
**Tahun 2021 - 2023**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun Ke- (dalam ribu rupiah)			Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (dalam ribu rupiah)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)			Pertumbuhan (%)	
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	96.520.561	82.438.939	81.719.190	84.438.598	78.240.150		87,48	94,91		(15)	(7)
a	Belanja Pegawai	28.513.055	32.196.729	31.145.602	28.048.900	30.984.448		98,37	96,23		9	10
b	Belanja Barang dan Jasa	68.007.506	50.242.210	50.573.588	56.389.698	47.255.702		82,92	94,06		(26)	(16)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	4.815.351	1.573.091	1.894.820	3.832.484	1.343.209		79,59	85,39		(61)	(65)
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	49.230.927	47.370.907	46.734.930	40.573.004	44.640.603		82,41	94,24		(5)	10
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.353.951	373.304	29.999	10.852.753	370.332		87,85	99,20		(100)	(97)
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	192.466	14.999	335.907	81.065	14.724		42,12	98,17		75	(82)
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.414.811	909.909	1.577.932	1.050.392	886.834		74,24	97,46		12	(16)
2	Belanja Modal	18.420.826	50.994.243	2.843.889	16.455.826	49.118.772		89,33	96,32		(85)	198
	<b>Jumlah Total</b>	<b>114.941.387</b>	<b>133.433.182</b>	<b>84.563.079</b>	<b>100.894.424</b>	<b>127.358.922</b>		<b>87,78</b>	<b>95,45</b>		<b>(26)</b>	<b>26</b>

## **2.4 . Kelompok Sasaran Layanan**

Kelompok Sasaran Layanan Kesehatan adalah masyarakat yang terutama bayi, anak, ibu hamil/bersalin, sekelompok masyarakat resiko tinggi terkena penyakit termasuk pekerja rentan dan usia lanjut yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Seluruh ibu hamil yang membutuhkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar;
2. seluruh ibu bersalin yang membutuhkan pelayanan persalinan sesuai standar;
3. seluruh bayi baru lahir yang membutuhkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar;
4. seluruh balita yang membutuhkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar;
5. seluruh anak usia pendidikan dasar yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
6. seluruh orang usia 15-59 tahun (usia produktif) yang membutuhkan skrining kesehatan sesuai standar;
7. seluruh orang usia 60 tahun ke atas yang membutuhkan skrining kesehatan sesuai standar;
8. seluruh penderita Hipertensi yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai standar
9. seluruh penderita Diabetes Mellitus yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
10. seluruh penderita Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
11. seluruh orang yang terduga TBC yang membutuhkan pelayanan TBC sesuai standar;
12. seluruh orang dengan risiko terinfeksi HIV yang membutuhkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar



## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan manusia dapat dinilai dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kesehatan yang secara umum turut memberikan kontribusi dalam peningkatan produktivitas. Salah satu indikator yang banyak digunakan dalam mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan indeks komposit yang meliputi aspek pendidikan, kesehatan dan aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli. Nilai IPM Kota Parepare adalah meningkat setiap tahunnya, namun bila ditelaah lebih lanjut diketahui masih terdapat permasalahan pembangunan manusia Kota Parepare khususnya bidang kesehatan.

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2019-202, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Parepare dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya upaya pemenuhan kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
2. tenaga kesehatan dan kader posyandu yang tidak intensif memantau ibu hamil yang beresiko tinggi di wilayah kerjanya;
3. masih adanya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan pertama di usia kehamilan lebih dari 12 minggu;
4. masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
5. masih kurangnya frekuensi pelaksanaan edukasi pada masyarakat berisiko;
6. belum ada puskesmas mampu poned;
7. belum adanya regulasi yang mengatur persalinan di pelayanan kesehatan;
8. belum semua puskesmas menerapkan Poli MTBS;
9. pemantauan pasien yang sedang mengalami pengobatan tidak dilakukan secara intensif khususnya dari pemantauan dari keluarga terdekat. Obat TB harus diminum secara rutin dan harus habis, ketika Obat TB tidak diminun sesuai aturan medis maka bakteri TB di dalam tubuh mengalami resistensi sehingga akan terjadi gagal pengobatan;

10. kurang intensifnya tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan pencarian orang dengan terduga Tuberkulosis dan kurangnya keterlibatan lintas sektoral dalam penanganan penyakit Tuberkulosis;
11. makin berkembangnya sumber penularan HIV yang berasal dari berbagai faktor risiko;
12. teknologi seksualitas yang semakin canggih dengan tersedianya fitur teknologi komersil seks dan mudahnya akses hubungan seks komersil dan tumbuhnya beragam orientasi seksual;
13. Populasi seks beresiko tinggi semakin bertambah disertai juga kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan kondom dalam pencegahan penyakit menular seksual;
14. kurangnya jumlah tenaga kesehatan melakukan *screening* penyakit terhadap kelompok usia produktif;
15. masih banyaknya pasangan usia subur yang belum menggunakan kontrasepsi karena diakibatkan oleh faktor agama, kesehatan, efek samping kontrasepsi, keluarga yang tidak mendukung, ketidakcocokan dengan alat kontrasepsi;
16. pengetahuan Sang Ibu yang kurang memadai dan asupan nutrisi yang kurang baik bagi ibu dan balita;
17. asupan zat besi yang tidak memadai, tingkat pendapatan yang kurang, pengetahuan yang kurang dan dukungan keluarga yang kurang;
18. masih banyaknya kelompok usia remaja belum memahami bahaya merokok sehingga masih mencoba rokok, baik rokok konvensional maupun rokok elektrik;
19. pola makan yang berlebihan yang tinggi lemak dan gula serta kurang serat dan aktifitas fisik yang kurang gerak;
20. masih banyak Rumah Tangga yang belum melakukan kebiasaan cuci tangan pakai sabun

### **3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD**

Penelaahan tujuan dan sasaran daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk memahami indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah dalam kurun waktu tersebut sehingga perangkat daerah dapat merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dapat berkontribusi dalam pencapaian target-target pembangunan daerah.

Dalam dokumen RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026, terdapat 3 (tiga) tujuan, 10 sasaran strategis, 4 (empat) indikator tujuan dan 16 indikator sasaran. Setiap indikator kinerja juga telah dilengkapi dengan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Tujuan dan sasaran RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024 - 2026

TUJUAN DAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET				
						2024	2025	2026	AKHIR RPD	
Tujuan I	Meningkatkan daya saing masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia		78,54	78,92	79,30	79,68	80,06	80,06
	Sasaran 1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Indeks Pendidikan		75,87	76,29	76,72	77,14	77,57	77,57
			Indeks Kesehatan		79,18	79,42	79,67	79,91	80,16	80,16
			Pengeluaran per kapita		14.027	14,23	14,43	14,63	14,84	14,84
	Sasaran 2	Meningkatnya Pengurusutamaan Gender (PUG)	Indeks Pemberdayaan Gender		73,52	76,27	79,13	82,10	85,17	85,17
Tujuan II	Meningkatkan perekonomian daerah yang berkelanjutan dan inklusif bagi kesejahteraan masyarakat		PDRB Per kapita	Juta Rp	54,26	57,53	60,99	64,66	68,56	68,56
			Inflasi	Persen	6,66	3,0 – 3,5	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0	2,0 – 3,0
	Sasaran 3	Meningkatnya produktivitas daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,93	6,15	6,50	6,86	7,00	7,00
	Sasaran 4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,41	5,29	5,18	5,07	4,96	4,96
	Sasaran 5	Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja	Tingkat Pengangguran	Persen	5,60	5,47	5,34	5,22	5,09	5,09
	Sasaran 6	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini (Gini ratio)		0,379	0,348	0,332	0,318	0,303	0,303
	Sasaran 7	Meningkatnya ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana dalam mendukung perekonomian daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		75,90	76,81	77,72	78,65	79,59	79,59
			Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana		0,42	0,48	0,53	0,58	0,62	0,62
Tujuan III	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi yang melayani		Indeks Reformasi Birokrasi		65,00 (CC)	67,75 (CC)	70,00 (B)	73,25 (B)	75,00 (BB)	75,00 (BB)
	Sasaran 8	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik		4,30	4,35	4,40	4,45	4,50	4,50
			Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik		4,46					
			Indeks Kepuasan Masyarakat		79,76	82,16	84,63	87,17	89,79	89,79
	Sasaran 9	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Nilai SAKIP		63,43 (B)	65,04 (B)	66,68 (B)	68,36 (B)	70,09 (BB)	70,09 (BB)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		66,46	67,52	68,60	69,70	70,81	70,81
Sasaran 10	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam tata kelola pemerintahan	Predikat SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)		2,50 (Cukup)	2,75 (Cukup)	3,0 (Baik)	3,15 (Baik)	3,25 (Baik)	3,25 (Baik)	

Memperhatikan tabel tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Dinas Kesehatan Kota Parepare dapat berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan kesatu, yaitu “Meningkatkan daya saing masyarakat”, khususnya pada sasaran kesatu ,yaitu “Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat”. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dalam bidang kesehatan, memberikan dukungan, pengaturan dan koordinasi atas pemerintah daerah bidang kesehatan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan maka Dinas Kesehatan berperan penting dalam penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Uoaya Kesehatan Perorangan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar, peningkatan sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar kesehatan dan aman bagi masyarakat serta peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan dalam urusan kesehatan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyusunan perencanaan pembangunan khususnya dalam urusan kesehatan adalah :

1. Transformasi Sistem Kesehatan Nasional berupa transformasi Layanan Primer, Layanan Rujukan, Sistem Ketahanan Kesehatan, Sistem Pembiayaan Kesehatan, SDM Kesehatan dan Teknologi Kesehatan.

Transformasi sistem kesehatan merupakan suatu upaya untuk mengubah sistem kesehatan yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas aksesibilitas, dan mengurangi disparitas dalam kesehatan antar wilayah.

2. Responsif Gender di bidang Kesehatan

masih banyak terdapat ketimpangan antara status kesehatan pada perempuan dan laki-laki. Masalah gender yang harus diprioritaskan penanganannya, adalah masih adanya Angka Kematian Ibu (AKI), pemberantasan Tuberkulosis Paru, Malaria, HIV/AIDS, masalah gizi masyarakat dan lingkungan yang tidak sehat.

Responsif Gender di bidang kesehatan merupakan perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan kesehatan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunannya dan pelaksanaannya. Responsif gender di bidang kesehatan perlu dilakukan untuk memastikan apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses terhadap sumberdaya kesehatan, partisipasi dan mempunyai kontrol yang sama dalam pengambilan keputusan, memperoleh manfaat yang sama dari semua bidang pembangunan khususnya bidang kesehatan, serta terhindarnya laki-laki dan perempuan yang mengalami diskriminasi layanan kesehatan, akibat perencanaan dan pelaksanaan yang tidak responsif gender

3. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Kesehatan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah Daerah Kota Parepare melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare agar targetnya dapat terpenuhi. Masih adanya beberapa indikator seperti pelayanan kesehatan usia produktif yang masih jauh di bawah target yang ditetapkan.

4. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di bidang kesehatan.

Masih adanya beberapa indikator TPB yang masih jauh di bawah target dan kurang lengkapnya data untuk memenuhi pencapaian target TPB

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota Parepare

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Parepare pada dasarnya merupakan penjabaran sektoral dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Parepare Tahun 2024-2026, sehingga perumusan tujuan dan sasaran tersebut berpedoman tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Parepare Tahun 2024-2026.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026, dirumuskan dalam 2 (dua) tujuan, 5 (lima) sasaran, 2 (dua) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran.

1. Tujuan I : Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program perangkat daerah  
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan
2. Tujuan II : Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat  
Sasaran I : Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP  
Sasaran II : Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar  
Sasaran III: Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat  
Sasaran IV: Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat

Secara jelas tujuan, sasaran dan indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2024 - 2026

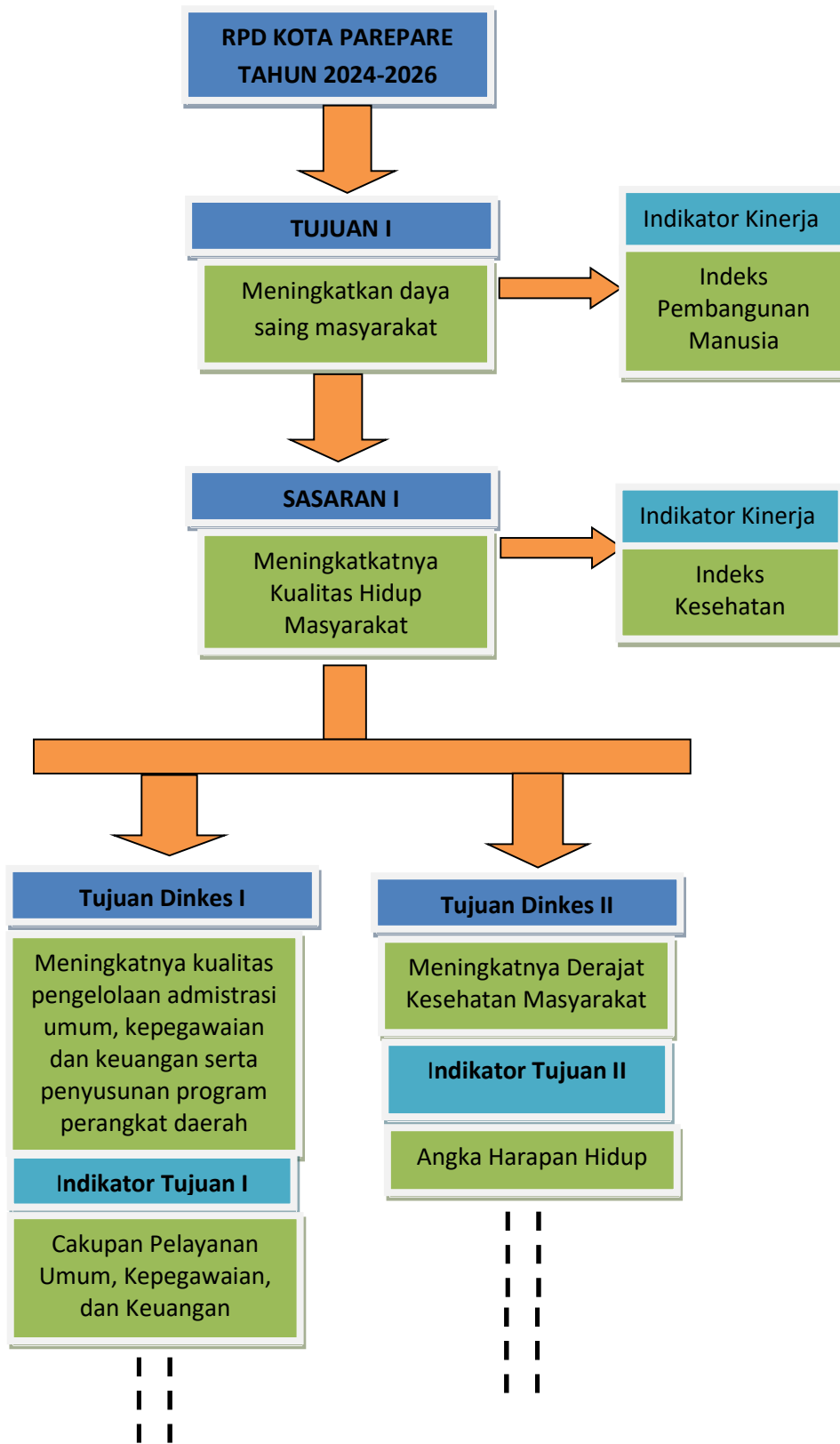
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA		
			2024	2025	2026
			Target	Target	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program perangkat daerah		Cakupan Pelayanan Umum, Kepegawaian, dan Keuangan	100	100	100
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan	Peningkatan Nilai SAKIP	B (70)	B (70)	BB (80)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Angka Harapan Hidup	79,67	79,91	80,16
	Meningkatnya Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Indeks SPM	0,33	0,33	0,33
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	5%	7%	10%
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	100%	100%	100%
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	80%	85%	90%

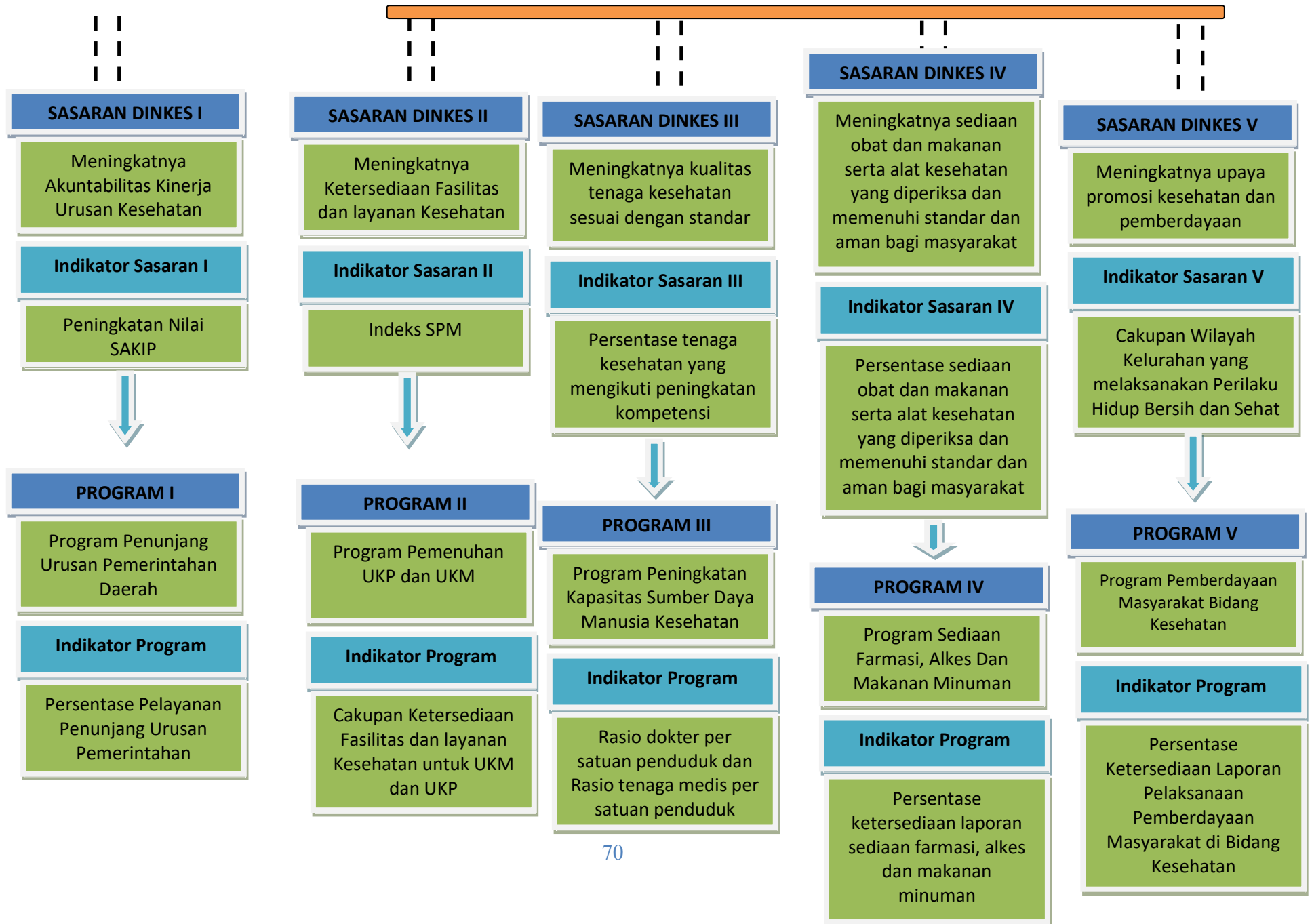


#### **4.2. Cascading Kinerja**

*Cascading* Kinerja merupakan penjabaran dan penyelarasan tujuan dan sasaran strategis serta target kinerjanya secara vertikal dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai. Penerapan *Cascading* Kinerja dalam suatu unit kerja bertujuan untuk menjadi acuan dalam penyusunan sasaran kinerja setiap pegawai yang dapat meningkatkan kinerja instansi di level strategis maupun operasional. Dengan adanya *cascading* kinerja maka akan memberikan penjelasan mengenai alur dan Langkah-langkah penyusunan sasaran strategis pegawai, mengidentifikasi peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. *Cascading* Kinerja juga dapat menjadikan pegawai lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya karena adanya penilaian kinerja yang obyektif. *Cascading* Kinerja Bappeda Kota Parepare dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 4.1 *Cascading* Kinerja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026







**Kegiatan :**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Peningkatan Pelayanan BLUD



**Kegiatan :**

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



**Kegiatan :**

1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



**Kegiatan :**

1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi TPM antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
5. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman



**Kegiatan :**

1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan efektif dan efisien, serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah dalam memberikan layanan bagi kelompok sasaran layanan

Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh perangkat daerah untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuanketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan harus menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi Bappeda Kota Parepare untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, adalah :

Berikut ini matrik tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026:

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan	Peningkatan sistem pelaporan capaian perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu	Peningkatan Sistem Pelaporan Berbasis Teknologi Informasi
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana Kesehatan	Akselerasi peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta kualitas kesehatan

	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar	Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan serta distribusi tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat	Penyediaan dan Fasilitas SDM kesehatan yang berkualitas
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	Menjamin ketersediaan obat dan makanan serta alkes yang memenuhi standar Kesehatan	Peningkatan jumlah penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memenuhi standar
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan Kegiatan GERMAS



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka disusunlah program-program Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2024-2026. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktifitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (Output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2024 - 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
			DINAS KESEHATAN			109.314.521.118		114.569.764.816		123.780.107.776		347.664.393.710			
Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan serta penyusunan program perangkat daerah				Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B		B		BB		BB			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kesehatan	Peningkatan Nilai SAKIP		Nilai SAKIP		70		70		80		80			
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	100%	42.281.720.000	100%	43.403.000.000	100%	44.788.750.000	100%	130.473.470.000		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian perencanaan dan evaluasi kinerja yang benar dan tepat waktu	100%	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%	14.500.000	100%	43.500.000	Dinas Kesehatan	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	2 dok	2.000.000	6 Dokumen	6.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	3 dok	6.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dok	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	3 dok	6.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	3 dok	6.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	3 dok	6.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dok	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	3 dok	6.000.000		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dok	1 dok	2.500.000	1 dok	2.500.000	1 dok	2.500.000	3 dok	7.500.000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan hasil sistem pelaporan capaian keuangan yang benar dan tepat waktu	100%	100%	30.022.500.000	100%	30.772.500.000	100%	31.541.250.000	100%	92.336.250.000		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	397 orang	397 orang	30.000.000.000	397 orang	30.750.000.000	397 orang	31.518.750.000	397 orang	92.268.750.000		
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 dok	1000 dok	15.000.000	1000 dok	15.000.000	1000 dok	15.000.000	3000 dok	45.000.000		
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 dok	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	3 Dok	6.000.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dok	1 dok	3.500.000	1 dok	3.500.000	1 dok	3.500.000	3 Dok	10.500.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 dok	14 dok	2.000.000	14 dok	2.000.000	14 dok	2.000.000	42 dok	6.000.000		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	162.000.000	100%	162.000.000	100%	162.000.000	100%	486.000.000		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok	1 Dok	6.000.000	1 Dok	6.000.000	1 dok	6.000.000	3 dok	18.000.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dok	4 Dok	6.000.000	4 Dok	6.000.000	4 Dok	6.000.000	12 Dok	18.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	20 orang	100.000.000	60 orang	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	10 orang	50.000.000	30 orang	150.000.000		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	407.000.000	100%	409.000.000	100%	411.000.000	100%	1.227.000.000		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	1 paket	10.000.000	3 paket	30.000.000		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	12.000.000	1 paket	13.000.000	1 paket	14.000.000	3 paket	39.000.000		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	23.000.000	1 paket	24.000.000	1 paket	25.000.000	3 paket	72.000.000		
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 bahan bacaan	6 bahan bacaan	25.000.000	6 bahan bacaan	25.000.000	6 bahan bacaan	25.000.000	6 bahan bacaan	75.000.000		
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	32.000.000	1 paket	32.000.000	1 paket	32.000.000	3 paket	96.000.000		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	4 Laporan	5.000.000	12 Laporan	15.000.000		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	30 laporan	300.000.000	30 laporan	300.000.000	30 laporan	300.000.000	90 laporan	900.000.000		
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	60.000.000	5 unit	70.000.000	6 unit	80.000.000	15 unit	210.000.000		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	60.000.000	5 unit	70.000.000	6 unit	80.000.000	15 unit	210.000.000		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terbayarnya jasa penunjang	100%	100%	830.000.000	100%	885.000.000	100%	940.000.000	100%	2.655.000.000		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	4 Laporan	25.000.000	12 Laporan	75.000.000		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	205.000.000	4 Laporan	210.000.000	4 Laporan	215.000.000	12 Laporan	630.000.000		
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	600.000.000	4 Laporan	650.000.000	4 Laporan	700.000.000	12 Laporan	1.950.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	550.000.000	100%	590.000.000	100%	640.000.000	100%	1.780.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	350.000.000	2 unit	360.000.000	2 unit	370.000.000	2 unit	1.080.000.000		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	80.000.000	10 unit	85.000.000	10 unit	90.000.000	10 unit	255.000.000		
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	20.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	30.000.000	10 unit	75.000.000		
			Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100.000.000	1 unit	120.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	370.000.000		
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		8 unit kerja	10.235.720.000	8 unit kerja	10.500.000.000	8 unit kerja	11.000.000.000	8 unit kerja	31.735.720.000		
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		8 unit kerja	10.235.720.000	8 unit kerja	10.500.000.000	8 unit kerja	11.000.000.000	8 unit kerja	31.735.720.000		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat															
	Peningkatan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Indeks Kesehatan		Indeks Kesehatan	79,18	79,67		79,91		80,16		80,16			
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan Fasilitas dan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	63.224.146.118	100%	66.816.764.816	100%	74.621.357.776	100%	204.662.268.710		
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Rasio puskesmas, poliklinik, puistu per satuan penduduk	0,29	0,29	17.672.748.000	0,29	18.720.000.000	0,29	20.770.000.000	0,29	57.162.748.000		
				Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,03	0,03	-	0,03	-	0,03	-	0,03	-		
				Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0,51	0,55		0,55		0,55		0,55			
				Rasio posyandu per satuan balita	61,3	61,3		61,3		61,3		61,3			
				Cakupan pembantu puskesmas	95,45	95,45		95,45		95,45		95,45			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Cakupan puskesmas	200	200		200		200		200			
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100%	100%		100%		100%		100%			
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		3 unit	4.500.000.000	3 unit	4.500.000.000	2 unit	3.000.000.000	8 Unit	12.000.000.000		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	9 Unit	900.000.000		
			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	9 Unit	450.000.000		
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		3 unit	4.500.000.000	3 unit	4.500.000.000	4 unit	6.000.000.000	10 Unit	15.000.000.000		
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		3 unit	4.500.000.000	3 unit	4.500.000.000	4 unit	6.000.000.000	10 Unit	15.000.000.000		
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 paket	1 paket	2.500.000.000	1 paket	3.000.000.000	1 paket	3.000.000.000	3 paket	8.500.000.000		
				Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	90	90		95		98		100			
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 paket	1 paket	1.000.000.000	1 paket	1.500.000.000	1 paket	2.000.000.000	3 paket	4.500.000.000		
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		160 unit	202.748.000	170 unit	250.000.000	180 unit	300.000.000	180 unit	752.748.000		
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 paket	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	3 paket	60.000.000		
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	100%	100%	45.031.398.118	100%	47.571.764.816	100%	53.311.357.776	100%	145.914.520.710		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2831	2891	500.000.000	2951	521.193.816	3011	531.790.776	3011	1.552.984.592	Dinas Kesehatan	
				Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	93%	93%		94%		95%		95%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2704	2793	172.760.000	2882	180.000.000	2971	190.000.000	2971	542.760.000		
				Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	212 per 100 KH	212 per 100 KH		170 per 100 KH		170 per 100 KH		170 per 100 KH			
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%	100%		100%		100%	0	100%			
				Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	87%	90%		95%		98%		98%			
				Cakupan pelayanan nifas	70%	70%		80%		85%		85%			
				Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	98%	98%		98%		98%		98%			
				Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.											
				Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).											
				Total Fertility Rate (TFR).											
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2880	2880	108.800.000	3185	110.000.000	3490	115.000.000	3490	333.800.000		
				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	10/1000 KH	8/1000 KH		7/1000 KH		6/1000 KH		6/1000 KH			
				Angka kelangsungan hidup bayi	977	980		982		985		985			
				Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	8/1000 KH	7/1000 KH		6/1000 KH		5/1000 KH		5/1000 KH			
				Cakupan kunjungan bayi	90%	92%		94%		95%		95%			
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	90%	92%		94%		95%		95%	0		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	15380	17380	251.540.000	19380	255.000.000	21380	300.000.000	21.380	806.540.000		
				Cakupan Pelayanan Anak Balita	100%	100%		100%		100%		100%			
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	0	0		0		0		0			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20877	22877	239.280.000	24.877	250.000.000	26.877	300.000.000	26.877	789.280.000		
				Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	100%	100%		100%		100%		100%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100397	101770	167.775.000	103143	206.286.000	104516	209.032.000	104516	583.093.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11888	12161	166.610.000	12434	170.000.000	12707	175.000.000	12707	511.610.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38602	38502	192.510.000	38402	192.010.000	38302	191.510.000	38302	576.030.000		
				Prevalensi tekanan darah tinggi.	20%	20%		15%		10%		10%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2603	2553	101.800.000	2503	120.000.000	2453	125.000.000	2453	346.800.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	357	352	118.900.000	347	130.000.000	342	150.000.000	342	398.900.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3525	3475	312.750.000	3425	308.250.000	3375	303.750.000	3375	924.750.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4861	4811	120.275.000	4761	119.025.000	4811	120.275.000	4811	359.575.000		
				Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		<0,05		<0,05		<0,05		<0,05			
				pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	50%	60%		70%		80%		80%			
				Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	75%	80%		80%		85%		90%			
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dok	1 Dok	103.000.000	1 Dok	110.000.000	1 Dok	120.000.000	3 Dok	333.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1 Dok	1 Dok	169.420.000	1 Dok	175.000.000	1 Dok	180.000.000	3 Dok	524.420.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dok	1 Dok	2.072.696.036	1 Dok	2.500.000.000	1 Dok	3.000.000.000	3 Dok	7.572.696.036		
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100		100		100		100			
				Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	13,7	12		11		10		10			
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	13,7	12		11		10		10			
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	13,9	12		11		10		10			
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.		<5		<5		<5		<5			
				Prevalensi anemia pada ibu hamil.	9	9		8		8		8			
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	60%	65%		65%		65%		65%			
				Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	100%		100%		100%		100%			
				Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	30%	24%		24%		20%		20%			
				Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum											
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dok	1 Dok	138.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	200.000.000	3 Dok	488.000.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dok	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	3 Dok	600.000.000		
				Cakupan kelurahan ber-STBM		41%		55%		68%		68%			



Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dok	1 Dok	804.607.486	1 Dok	850.000.000	1 Dok	900.000.000	3 Dok	2.554.607.486		
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dok	1 Dok	164.600.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	250.000.000	3 Dok	614.600.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dok	1 Dok	78.400.000	1 Dok	85.000.000	1 Dok	90.000.000	3 Dok	253.400.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	357	352	67.000.000	347	70.000.000	342	75.000.000	342	212.000.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	0	5 orang	64.200.000	5 orang	70.000.000	5 orang	75.000.000	5 orang	209.200.000		
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dok	1 Dok	70.000.000	1 Dok	70.000.000	1 Dok	70.000.000	3 Dok	210.000.000		
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dok	1 Dok	89.000.000	1 Dok	95.000.000	1 Dok	100.000.000	3 Dok	284.000.000		
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dok	1 Dok	1.500.000.000	1 Dok	1.700.000.000	1 Dok	3.000.000.000	3 Dok	6.200.000.000		
				Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		100		100		100		100			
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		0,01		0,01		0,01		0,01			
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani		100		100		100		100			
				Penderita diare yang ditangani		100		100		100		100			
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100		100		100		100			
				Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100	100		100		100		100			
				Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	20%	20%		15%		10%		10%			
				Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	45%	40%		30%		20%		10%			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	6 pasien	6 pasien		5 pasien		5 pasien		5 pasien			
				Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Proporsi kematian akibat keracunan.	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100		100		100					
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dok	1 Dok	29.175.555.000	1 Dok	30.000.000.000	1 Dok	32.000.000.000	3 Dok	91.175.555.000		
				Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100%		100%		100%		100%			
				Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%		100%		100%		100%			
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	85%	90%		95%		95%		95%			
				Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	850/1000 pddk	800/1000 pddk		900/1000 pddk		950/1000 pddk		950/1000 pddk			
				Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).		100%		95%		95%		95%			
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	0	50 orang	77.000.000	50 orang	80.000.000	50 orang	90.000.000	50 orang	247.000.000		
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	50	50	39.000.000	50	50.000.000	50	60.000.000	150	149.000.000		
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dok	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	1 Dok	200.000.000	3 Dok	600.000.000		
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	8 Dok	8 Dok	3.519.769.596	8 Dok	4.000.000.000	8 Dok	5.000.000.000	24 Dok	12.519.769.596		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dok	3 Dok	2.667.000.000	3 Dok	3.000.000.000	3 Dok	3.500.000.000	9 Dok	9.167.000.000		
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	9 Unit	9 Unit	600.000.000	9 Unit	600.000.000	9 Unit	600.000.000	9 Unit	1.800.000.000		
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	8 Lap	8 Lap	81.000.000	8 Lap	85.000.000	8 Lap	90.000.000	24 Lap	256.000.000		
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	8 Dok	8 Dok	168.350.000	8 Dok	170.000.000	8 Dok	180.000.000	24 Dok	518.350.000		
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar melalui Pendekatan Keluarga	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	438 orang	438 orang	201.300.000	438 orang	210.000.000	438 orang	250.000.000	438 orang	661.300.000		
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	70%	80%		90%		95%		95%			
				Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	290/100.000	280/100.000		270/100.000		260/100.000		260/100.000			
				Tingkat kematian karena Tuberkulosis	4%	4%		4%		3%		3%			
				Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	87%	87%		90%		95%		95%			
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	87%	87%		90%		95%		95%	0		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Orang dengan HIV (ODHIV) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	31 orang	31 orang	120.200.000	31 orang	130.000.000	31 orang	150.000.000	31 orang	400.200.000		
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	11 orang	11 orang	78.800.000	11 orang	80.000.000	11 orang	85.000.000	11 orang	243.800.000		
				Angka kejadian Malaria	10	10		8		7		7			
				Tingkat kematian akibat malaria	0	0		0		0		0			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0		0		0		0			
				Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0	0		0		0		0			
			Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	1 Dok	1 Dok	79.500.000	1 Dok	80.000.000	1 Dok	85.000.000	3 Dok	244.500.000		
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Fasyankes melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	100%	420.000.000	100%	425.000.000	100%	430.000.000	100%	1.275.000.000		
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	1 Dok	1 Dok	70.000.000	1 Dok	75.000.000	1 Dok	80.000.000	3 Dok	225.000.000		
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan		3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	3 unit	300.000.000	9 unit	900.000.000		
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Persentase Rumah sakit/Klinik dan fasyankes lainnya yang dibina dan diawasi	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	310.000.000		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasyankes lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	4 unit	4 unit	50.000.000	4 unit	50.000.000	4 unit	50.000.000	4	150.000.000		
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	6 unit	60.000.000	16 unit	160.000.000		
	Meningkatnya kualitas tenaga kesehatan sesuai dengan standar	Peningkatan Tenaga Kesehatan yang berkompeten dan dapat diandalkan		Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti peningkatan kompetensi	5%	5%		7%		10%		12%			
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	45/100.000	50/100.000	400.000.000	50/100.000	400.000.000	50/100.000	400.000.000		1.200.000.000	Dinas Kesehatan	
				Rasio tenaga medis per satuan penduduk	98/100.000	98/100.000		98/100.000		98/100.000		98/100.000			

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Perizinan Jumlah Tenaga Kesehatan yang telah memperoleh rekomendasi perizinan dan pengawasan	850 orang	850 orang	100.000.000	850 orang	100.000.000	850 orang	100.000.000	850 orang	300.000.000		
			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Lapoaran Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota yang dibuat	2 Dok	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	150.000.000	6 Dok	450.000.000		
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	500 orang	500 orang	50.000.000	500 orang	50.000.000	500 orang	50.000.000	500 orang	150.000.000		
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		5%	150.000.000	7%	150.000.000	10%	150.000.000	12%	450.000.000		
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	30 orang	150.000.000	90 orang	450.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatnya sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	Peningkatan Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat		Persentase sediaan obat dan makanan serta alat kesehatan yang diperiksa dan memenuhi standar dan aman bagi masyarakat	100%	100%		100%		100%		100%			
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase ketersediaan laporan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	1.800.000.000	Dinas Kesehatan	
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan sarana yang memiliki ijin kesehatan	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 sarana	50 sarana	50.000.000	50 sarana	50.000.000	50 sarana	50.000.000	50 sarana	150.000.000		
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang dibuat	100%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	900.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	PersentaseJumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dok	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	300.000.000	3 Dok	900.000.000		
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Laporan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang dibuat	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000		
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Laporan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dibuat	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	150.000.000		
			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	3 Dok	150.000.000		
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang memenuhi syarat kesehatan	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	24 unit	24 unit	50.000.000	24 unit	50.000.000	24 unit	50.000.000	24 unit	150.000.000		
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	150.000.000		
	Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Peningkatan Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		Cakupan Wilayah Kelurahan yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	70%	80%		85%		90%		90%			
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Ketersediaan Laporan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan	70%	80%	2.808.655.000	85%	3.350.000.000	90%	3.370.000.000	90%	9.528.655.000	Dinas Kesehatan	
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang dibuat	100%	100%	2.510.600.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	8.510.600.000		
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dok	1 Dok	2.510.600.000	1 Dok	3.000.000.000	1 Dok	3.000.000.000	1 Dok	8.510.600.000		
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	300.000.000		
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dok	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	150.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator	Bidang Urusan Pemerintahan / SKPD / Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja (Outcome) / Indikator Kinerja (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD		Unit kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat		50 keluarga	50.000.000	50 keluarga	50.000.000	50 keluarga	50.000.000	50 keluarga	150.000.000		
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dibuat	100%	100%	198.055.000	100%	250.000.000	100%	270.000.000	100%	718.055.000		
			Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dok	1 Dok	198.055.000	1 Dok	250.000.000	1 Dok	270.000.000	1 Dok	718.055.000		
JUMLAH							109.314.521.118		114.569.764.816		123.780.107.776		347.664.393.710		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan Indikator Kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD menjadi hal yang sangat urgen untuk dilaksanakan. Dengan adanya penetapan indikator kinerja tersebut maka dapat terlihat sejauh mana suatu perangkat daerah dapat berkontribusi langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja Dinas Kesehatan dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### **7.1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan perangkat daerah (*Impact*). Formulasi IKU disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi dan isu-isu strategis perangkat daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja perangkat daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama tahun 2024-2026 dilakukan dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>							
<b>1</b>	<b>Predikat evaluasi SAKIP oleh APIP</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>BB</b>
	Nilai SAKIP	Nilai	70	70	70	70	80	80
<b>2</b>	<b>Indeks Kesehatan</b>	<b>Persen</b>	<b>79,18</b>	<b>79,42</b>	<b>79,67</b>	<b>79,91</b>	<b>80,16</b>	<b>80,16</b>

## 7.2. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) atau *Key Performance Indicators* (KPI) memberikan arahan kepada perangkat daerah dalam menentukan dan mengukur kemajuan (progress) untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Olehnya itu, penetapan IKK Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026 dilakukan dengan memperhatikan realisasi tahun sebelumnya serta disusun sesuai dengan urusan dan kewenangan perangkat daerah. Target Indikator Kinerja Kunci Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 7.1. INDIKATOR KINERJA KUNCI DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN 2024 - 2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)</b>							
1	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
2	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Per 1000 Penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	0,51	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
4	Rasio posyandu per satuan balita	Per 1000 Balita	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3	61,3
5	Cakupan pembantu puskesmas	Persen	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45	95,45
6	Cakupan puskesmas	Persen	200	200	200	200	200	200

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
7	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2748	2748	2891	2951	3.011	3011
9	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	Persen	66%	70%	93%	94%	95%	95%
10	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2362	2362	2793	2882	2971	2971
11	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	212 per 100 KH	212 per 100 KH	212 per 100 KH	170 per 100 KH	170 per 100 KH	170 per 100 KH
12	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Persen	87%	90%	90%	95%	98%	98%
14	Cakupan pelayanan nifas	Persen	70%	70%	70%	80%	85%	85%

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
15	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	95%	96%	98%	98%	98%	98%
16	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2357	2357	2880	3185	3490	3490
17	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	9,7/1000 KH	8/1000 KH	8/1000 KH	7/1000 KH	6/1000 KH	6/1000 KH
18	Angka kelangsungan hidup bayi		977	980	980	982	985	985
19	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	8,49/1000 KH	7/1000 KH	7/1000 KH	6/1000 KH	5/1000 KH	5/1000 KH
20	Cakupan kunjungan bayi	Persen	90%	91%	92%	94%	95%	95%
21	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Persen	90%	91%	92%	94%	95%	95%
22	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	15380	15380	17380	19380	21380	21380
23	Cakupan Pelayanan Anak Balita	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
24	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	0	0	0	0	0	0
25	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21610	21610	22877	24.877	26.877	26.877
26	Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 Jam	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	26483	26483	101770	103143	104516	104516
28	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	11888	11888	12161	12434	12707	12707
29	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	8517	8517	38502	38402	38302	38302
30	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Persen	20%	20%	20%	15%	10%	10%
31	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	2603	2603	2553	2503	2453	2453

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
32	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai	Orang	240	240	352	347	342	342
33	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	2747	2747	3475	3425	3375	3375
34	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang	4811	4811	4811	4761	4811	4811
35	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	Persen	0,35	0,35	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05
36	pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Persen	50%	50%	60%	70%	80%	80%
37	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	Persen	75%	75%	80%	80%	85%	85%
38	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Persen	100	100	100	100	100	100
39	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Persen	13,7	12	12	11	10	10

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
40	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persen	13,7	12	12	11	10	10
41	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Persen	13,9	12	12	11	10	10
42	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persen	5	5	<5	<5	<5	<5
43	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Persen	9	9	9	8	8	8
44	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persen	60%	65%	65%	65%	65%	65%
45	Cakupan pemberian MPASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
46	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Persen	30%	30%	24%	24%	20%	20%
47	Proporsi penduduk dengan tingkat asupan kalori dibawah standar konsumsi minimum							
48	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	Persen	100	100	100	100	100	100
49	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 100.000 pddk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
50	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
51	Penderita diare yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100
52	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Persen	100	100	100	100	100	100
53	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Persen	100	100	100	100	100	100
54	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Persen	20%	20%	20%	15%	10%	10%
55	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persen	45%	45%	40%	30%	20%	20%
56	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Pasien	6 pasien	6 pasien	6 pasien	5 pasien	5 pasien	5 pasien
57	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Kasus	0	0	0	0	0	0
58	Proporsi kematian akibat keracunan.	Persen	0	0	0	0	0	0

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
59	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	100	100	100	100	100	100
60	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
61	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
62	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Persen	85%	85%	90%	95%	95%	95%
63	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	per 1000 pddk	800/1000 pddk	800/1000 pddk	800/1000 pddk	900/1000 pddk	950/1000 pddk	950/1000 pddk
64	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Persen	85%	85%	90%	95%	95%	95%
65	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Persen	70%	75%	80%	90%	95%	95%
66	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 pddk	290/100.000	290/100.000	280/100.000	270/100.000	260/100.000	260/100.000
67	Tingkat kematian karena Tuberkulosis	Persen	4%	4%	4%	4%	3%	3%

No	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2022	Perkiraan 2023	TARGET KINERJA			
					2024	2025	2026	AKHIR RPD
					Target	Target	Target	Target
	5				7	9	11	11
68	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	Persen	87%	87%	87%	90%	95%	95%
69	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Persen	87%	87%	87%	90%	95%	95%
70	Angka kejadian Malaria	Kasus	10	10	10	8	7	7
71	Tingkat kematian akibat malaria	Kasus	0	0	0	0	0	0
72	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	Persen	0	0	0	0	0	0
73	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	Persen	0	0	0	0	0	0
74	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000	45/100.000	50/100.000	50/100.000	50/100.000	50/100.000	50/100.000
75	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 100.000	95/100.000	98/100.000	98/100.000	98/100.000	98/100.000	98/100.000

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan serta menghindari terjadinya kekosongan perencanaan, maka diperlukan sebuah pedoman transisi yang akan digunakan saat berakhirnya perodesasi Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2026. Pedoman transisi ini menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Parepare tahun 2027 berpedoman pada dokumen RPJMD Kota Parepare tahun 2025-20230 dan RKPD Kota Parepare Tahun 2027 untuk tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024 – 2026 harus dijadikan rujukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024 hingga Tahun 2026.
2. Dinas Kesehatan Kota Parepare menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2024 hingga Tahun 2026 berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Renstra ini sebagai dokumen operasional pelaksanaan pembangunan tahunan. Dokumen Renja ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Seluruh ASN Dinas Kesehatan Kota Parepare berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dan evaluasi secara internal terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun 2024-2026.

